



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : I (satu)
Rapat Ke : 7
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 9 September 2020
Waktu : 17.00 s.d 19.00 WIB
Tempat : Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara : Membahas tentang:
1. RKA K/L Tahun 2021; dan
2. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
37 dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI, dengan rincian:
1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)
8 dari 12 orang Anggota
1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2. Ir. Mindo Sianipar
3. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
4. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
5. Drs. I Made Urip, M.Si.
6. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
7. Maria Lestari, S.Pd.
8. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
5 dari 8 orang Anggota
1. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.

2. Budhy Setiawan
 3. Firman Soebagyo, S.E., M.M.
 4. Ir. Ichsan Firdaus
 5. Alien Mus, S.H.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)
5 dari 8 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Renny Astuti, S.H., S.P.N.
 3. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
 4. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 5. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem)
5 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
 2. H. Sulaeman L. Hamzah
 3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 4. H. Charles Meikyansyah
 5. Julie Sutrisno
 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
2 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan, S.E./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
2 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Suhardi Duk, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
5 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 3. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.H.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.
 5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.
 8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
4 dari 4 orang Anggota
 1. Haerudin, S.Ag., M.H.
 2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
 3. Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E.
 4. Slamet Ariyadi, S.Psi.
 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, S.Sy.
2. Ema Umiyyatul Chusnah

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
2. Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Ir. Agus Dermawan, M.Si. (Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan
9. Berny Achmad Subki, S.T., M.Sc. (Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang terhormat Sekretaris Jenderal dan para pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya.

Pak Sekjen, yang tidak hadir Eselon I berapa orang?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Yang tidak hadir 3 orang sekarang Eselon I tadi 2, yang satu ikut ke Banggar mohon maaf mewakili.

KETUA RAPAT:

Yang dua tidak diwakili?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Yang dua diwakili ada Ases-nya.

KETUA RAPAT:

Mana Asesnya? Bawa surat kuasa kan?

Ingat lain kali harus bawa surat kuasa, karena anda mewakili mengambil keputusan ya Pak Sekjen. Nanti juga pada Rapat Kerja nanti kalau Bapak Edhy Prabowo masih belum sehat, istirahat, Bapak Sekjen harus bawa surat kuasa, karena mewakili. Saya barusan konsultasi sama Pimpinan Banggar.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021, yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Bamus pada 13 Juli 2020. Coba dengar dulu kalau orang ngomong, serta tindak lanjut dari Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 27 Agustus 2020, pada hari ini Rabu

tanggal 9 September 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal dan pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas RKAKL tahun 2021 dan usulan program-program yang telah didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib, Rapat Dengar Pendapat kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 17.00 WIB)

Rapat Dengar Pendapat Ini kita mulai pada pukul 17.00 WIB dan akan diakhiri pada pukul 20.00 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 254 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Eselon I;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Tolong Anggota damping saya satu untuk mencapai kuorum sesuai dengan mekanisme MD3.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya usul Bapak Slamet Ketua, Pak Slamet Madura.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Rapat Dengar Pendapat hari ini merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 27 Agustus 2020 yang lalu, bahwa pagu alokasi anggaran belanja daerah RKAKL Tahun Anggaran 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6,65 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp6,49 triliun, Badan Layanan Umum sebesar Rp32 miliar dan Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP senilai Rp109,59 miliar dan pinjaman luar negeri sebesar Rp12,32 miliar sedangkan anggaran untuk

DAK 2021 sebesar Rp21 triliun, di mana terdiri dari Rp350 miliar untuk alokasi provinsi dan Rp650 miliar untuk kabupaten kota.

Pak Sekjen, saya mengingatkan dalam memutuskan DAK harus ada konsultasi juga kepada Komisi IV DPR RI, yang mana kita harus memberikan penghargaan maupun hukuman kepada kabupaten kota, provinsi yang kurang jelas. Jadi maksudnya gini, peningkatan produksi udang vaname targetnya sekian ribu ton, kalau mencapai lebih di kasihlah DAK-nya untuk fasilitas serta infrastrukturnya. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat ini selain program dan kegiatan yang bersifat peningkatan dan pengembangan infrastruktur, namun juga penambahan volume dan anggaran pada bantuan Pemerintah yang sifatnya pemulihan ekonomi, pelaku usaha dan stimulus, seperti Mina benih ikan, bina padi, bioflok, pakan ikan mandiri, gemar ikan, cheese fisher, kapal nelayan, alat tangkap ikan, bakti Nelayan, bakti mutu karantina, apartemen udang, ikan, desa wisata bahari, kelompok penggerak konservasi, kelompok masyarakat, pengawas dan kegiatan lainnya.

Untuk itu Komisi IV DPR RI ingin meminta penjelasan program dan kegiatan per Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021 sekaligus meminta penjelasan terhadap kriteria teknis dan menu DAK 2021 di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi skala prioritas untuk provinsi, kabupaten kota, di seluruh Indonesia.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar kami sampaikan, selanjutnya persilahkan kepada Sekjen atau Eselon I Kementerian Kelautan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Saya minta jangan terlalu lama, singkat, jelas, padat.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Rapat, Bapak Ketua Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati juga Ibu dan Bapak Anggota Dewan Komisi V DPR RI.

Bismillahirrahmanirrahim.

Kami akan menyampaikan pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI. Dan kami mohon doa semoga kawan-kawan kita yang terkena sakit segera sembuh dan kita-kita yang sehat dijauhkan dari penyakit, aamiin,

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Renja dan Anggaran KKP Tahun 2001 sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Kelautan pada Rapat Kerja tanggal 27 Agustus 2020, Pagu Anggaran KKP adalah sebesar Rp6,65triliun terdiri atas Pagu Indikatif sebesar Rp5,67 triliun dan tambahan Pagu Anggaran sebesar Rp974,32 miliar. Sesuai dengan SEB Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S692 dan B636 tanggal 5 Agustus 2020, perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021.

Rencana Pagu Anggaran KKP Tahun 2021 berdasarkan unit kerja Eselon I KKP, yaitu untuk:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp497,64 miliar;
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp93,76 miliar;
3. Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp763,57 miliar;
4. Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp1,21 triliun;
5. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp978,08 miliar;
6. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp431,70 miliar;
7. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp455,35 miliar;
8. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,62 triliun; dan
9. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan sebesar Rp592,72 miliar.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Selanjutnya mohon ijin perkenankan kami menyampaikan secara *highlight* kegiatan prioritas unit kerja Eselon I KKP tahun 2021. Sesuai dengan anggaran Rapat Dengar Pendapat ini perkenankan kami sampaikan penjelasan, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Tangkap, antara lain pengadaan perikanan dan alat penangkapan ikan, bantuan premi asuransi nelayan, fasilitas sertifikat hak atas tanah nelayan, pembangunan atau rehabilitasi pelabuhan perikanan, kampung nelayan maju dan EFF dan DED eco fishing port, FS fasilitas pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dan bertaraf Internasional, layanan perijinan Silat dan Simkada dan operasional SKPT di empat lokasi.
2. Kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Budidaya antara lain kegiatan percobaan cluster kawasan tambak udang, Mina Padi, bioflok, eskavator, pengelolaan irigasi, tambak dan/atau kolam, kebun bibit rumput laut, mesin pakan dan bahan baku pakan mandiri, KJA budidaya laut, percontohan pakan alami, budidaya ikan hias, bantuan benih ikan dan calon induk, bantuan bibit rumput laut, pembangunan Rehab atau Sarpras UPR HSRT, model usaha ikan

- konsumsi, prasehatkan asuransi usaha budaya dan operasional SKPT di 3 lokasi.
3. Prioritas Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, antara lain pembangunan gudang beku, *integrated cold storage*, pasar ikan, sentra kuliner, pasar ikan modern, mesin, *chest freezer* dan peralatan pengolahan, mobil berfreemasi, perlengkapan pedagang ikan, gemar ikan, sarana pemasaran dan pasca panen, fasilitas pasar ikan bertaraf internasional dan operasional SKPT di luar lokasi.
 4. Kegiatan prioritas Ditjen Pengolahan Ruang Laut, antara lain rehabilitasi mangrove, pengelolaan kawasan konservasi, pembangunan dermaga apung, pembangunan pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir, gita laut dan penanganan sampah di pesisir dan PPK integrasi pergaraman, sarana prasarana niaga garam rakyat, percontohan washing plan garam, revitalisasi gudang garam rakyat, sentra ekonomi garam rakyat, Sarpras wisata bahari, bantuan kelompok penggerak konservasi dan operasional SKPT di empat lokasi.
 5. Kegiatan prioritas Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain operasional kapal pengawas dan pesawat patrol, bangunan pos pengawas, pengawasan kawasan konservasi, pengawasan kepatuhan kapal perikanan dan pembudidayaan ikan, water canon kapal pengawas, pembangunan kapal pengawas, bangunan pos pengawasan dan pembinaan Pokwasmas.
 6. Kegiatan prioritas pada riset dan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain penyelenggaraan pendidikan vokasi, pelatihan dan penyuluhan, sertifikasi kompetensi, pengabdian pendidikan tinggi KP, mobil simulator, model sosial ekonomi Kelautan dan Perikanan, Sarpras riset dan data satelit radar, stock assessment, dan Sarpras pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KB.
 7. Kegiatan prioritas Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, antara lain pelayanan sertifikasi dan pengawasan karantina, sertifikasi dan pengawasan mutu hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu berstandar internasional, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan karantina dan mutu hasil perikanan serta pengawasan di perbatasan.
 8. Kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal, antara lain untuk pengawasan internal mitra Inspektorat 1 sampai 5, sinergi pengawasan dengan pihak eksternal, percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, pembangunan budaya integrasi KKP dan pengawasan LK KPP.
 9. Kegiatan prioritas Sekjen tahun 2021, antara lain akan digunakan untuk kegiatan layanan penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan, pengelolaan perencanaan, penganggaran, kinerja dan kerja sama antar lembaga, pengelolaan administrasi dan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri, pengelolaan data statistik dan informasi

operasional BLU LPMUKP dan dana dekonsentrasi kegiatan pengolahan, perencanaan, penganggaran dan kinerja.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV Republik Indonesia yang kami hormati.

Terkait agenda pembahasan yang selanjutnya, ijinilah kami menyampaikan penjelasan mengenai usulan Dana Alokasi Khusus bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 yang disusun setelah dikordinasikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kriteria teknis Dana Alokasi Khusus bidang KP untuk provinsi, yaitu:

1. Sentra produksi kelautan dan perikanan;
2. Termasuk dalam rencana induk pelabuhan perikanan nasional;
3. Status penetapan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil;
4. Tingkat kerawanan illegal unreported and unregulated IUU Fishing, provinsi kepulauan, status penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, arahan Presiden dan amanah Perpres dan kawasan Indonesia bagian timur.

Sedangkan teknis bidang KP untuk kabupaten kota, meliputi:

1. Sentra produksi perikanan;
2. Jumlah nelayan pembudidaya pengolahan dan pemasaran hasil ikan;
3. Memperhatikan lokasi kabupaten afirmatif, tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar;
4. Kawasan Indonesia bagian timur dan memperhatikan focus, locus pengembang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Nomor S229/PK/2020 tanggal 4 Juni 2020 dari total alokasi pagu Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 sebesar Rp65,65 triliun, DAK Bidang KP mendapatkan alokasi sebesar Rp1 triliun, terdiri atas DAK KP Provinsi sebesar Rp350 miliar dan Kabupaten Kota sebesar Rp650 miliar. Secara garis besar terdapat 7 menu kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Provinsi dan 4 menu kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh kabupaten kota.

Adapun target output DAK bidang KP untuk provinsi tahun 2021 berdasarkan usulan dari daerah yang telah masuk dalam aplikasi, yaitu pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana 59 pelabuhan perikanan, pembangunan dan rehabilitasi 30 unit pembenihan, pembangunan rehab pengadaan Sarpras kawasan konservasi di 35 kawasan konservasi, pembangunan atau rehab Sarpras kelautan di pesisir dan pulau-pulau kecil di 41 pulau-pulau kecil, pengadaan Sarpras pengawasan sebanyak 17 unit dan 219 paket pengawasan, Sarpras garam rakyat berupa satu paket pembangunan gudang garam 1000 ton, 15 unit revitalisasi gudang garam rakyat lebih kecil dari 100 ton, 118 paket rumah tanal garam, 5 lokasi integrasi pergaraman 8 sampai 15 hektar, dan 276 paket percontohan budidaya laut.

Sedangkan target output DAK bidang KP untuk Kabupaten Kota tahun 2021, yaitu pembangunan rehabilitasi 160 unit pembenihan, pengadaan 2.032 kapal kisaran 5 GT, 11.589 alat penangkap ikan dan 10.139 alat bantu penangkap ikan, 2.411 paket pembudidayaan ikan, rehabilitasi Sarpras pengolahan dan pemasaran berupa dua pabrik es, 3 *cold storage*, 19 pasar ikan, dan 104 mikro.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Demikian yang dapat kami sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat kali ini, apabila diperlukan penjelasan lebih teknis dan mendalam akan disampaikan oleh Dirjen, Irjen, atau Kabadan. Seluruh saran dan masukan dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan KKP. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI yang sangat besar kepada KKP dan mohon persetujuan lebih lanjut terhadap Rancangan RKAKL KKP tahun 2021.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Santi Santi Santi om,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada saudara Sekjen atas penjelasan yang telah disampaikan.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Anggota untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau sarannya. Saya persilahkan yang pertama Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI. DESS., M.Sc.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Ketua yang saya banggakan.

Bapak Sekjen dan para Dirjen yang saya hormati,
Dan khususnya teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI yang saya banggakan.

Mendengar semua uraian Pak Sekjen, kami sebetulnya sangat senang hanya saja Pak Sekjen, kebetulan Dapil kami ini di Cianjur yang untuk potensi perikanan itu letaknya sangat jauh Pak, kira-kira 8 jam dari kota Cianjur ke Cidaun. Nah, ini perlu dipikirkan bagaimana transportasi

hasil-hasil ikan selama ini yang kekurangan untuk pendingin. Kemudian di Bogor Pak, ada beberapa ikan hias yang sangat dikendalikan oleh para broker. Jadi kalau sudah mulai ekspor si broker itu biasanya menentukan pilihan jenis ikan yang lain yang dikelola oleh para pembudidaya ikan. Nah, jadi mohon ada mediasi untuk mengumpulkan para-para broker ini memberikan apa namanya standar harga dan standar untuk eksportnya dan mempermudah ekspor.

Yang kedua, tentang budidayanya Pak. Jadi budidaya perikanan yang ada di Bogor itu kesulitan dalam pengadaan makanannya. Nah, jadi kami mengusulkan untuk ada pelatihan-pelatihan untuk mengadakan makanan ikan yang lebih simple. Kemudian yang kedua adalah budidaya ikan hias sama juga Pak, jadi diperlukan makanan yang berupa cacing-cacing sutra itu bisa disosialisasikan secara massal kepada pembudidaya ikan.

Nah, yang berikutnya adalah pengolahan perikanan Pak. Jadi kami ingin sekali mengemas yang Pak Menterinya sudah setuju, bahwa gemar ikan itu dikemas untuk dibuat mie ataupun nugget, dicampur dengan daun kelor Pak, karena stunting di Bogor dan Cianjur sangat tinggi.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ibu Endang, kalau masalah tadi ngomong masalah yang lain-lain tidak perlu ngomong di sini, tinggal bisikin saja menterinya selesai. Selanjutnya Pak Johan Rosihan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua yang baik hati,
Anggota yang saya hormati,
Bapak Sekjen beserta seluruh jajaran Eselon I.

Yang pertama, kemarin ketika waktu acara makan ikan di Sumbawa Pak Ketua, Bapak Sekjen, terungkap bahwa angka makan ikan di Sumbawa itu di bawah rata-rata nasional, baru angka 42 pointnya, di bawah rata-rata nasional 47, padahal itu adalah daerah yang sepanjang laut utara selatan yang jaraknya 53 km, artinya dia diliputi oleh laut itu juga sumber benih lobster segala macam. Saya ingin katakan bahwa ini pasti ada persoalan pada rantai distribusinya dan keterjangkauan dari masyarakatnya. Jadi potensi ikannya banyak, baik budidaya maupun tangkapnya banyak tetapi dia tidak terjangkau oleh masyarakat atau mungkin tidak sampai kepada karena kontur daerah kami itu adalah daerah bukit pegunungan. Karenanya mungkin mohon perhatian agar mungkin di dalam program nanti, baik itu di dana APBN maupun DAK nanti akan memberikan perhatian agar rantai distribusi atau rantai dingin dari

ikan itu, itu bisa menjadi perhatian sambil memperbaiki beberapa sarana-sarana, baik itu berupa pelabuhan tangkap, terus tempat pelelangan ikannya, bahkan kemarin ada tertunda karena covid mungkin bisa diprioritaskan pasar ikan bersih dan pusat kuliner. Yang itu sudah dianggarkan sebenarnya pada tahun kemarin, tapi dengan alasan covid kemudian itu tertunda.

Selanjutnya Pak Ketua dan Pak Sekjen yang saya hormati, dari sisi soal pembahasan anggaran kita APBN ini, kami catat bahwa di Dirjen Perikanan Tangkap membuat target produksi perikanan tangkap 2021 itu sebesar 8,08 juta ton dengan nilai tukar nelayan 102 sampai 104. NTN pada Agustus sekarang ini, itu baru pada angka 95,25 jauh turun dibandingkan bulan Juli atau bulan April kemarin, termasuk sebarannya. Bahkan pada bulan April lebih dari 70% provinsi di Indonesia ini NTN-nya dibawah 100. Inikan harus menjadi soal kita sehingga nanti dalam penyebaran anggarannya juga harus memperhatikan sebaran-sebaran provinsi yang nilai tukar nelayannya itu dibawah 100 agar kemudian kesejahteraan nelayan kita itu bisa ditingkatkan. Karenanya saya mengharapkan ke KKP untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi jangan kita berikan besar kepada nelayan-nelayan tangkap yang kecil yang mungkin ukuran 7 meter, 9 meter itu bisa dipakai oleh nelayan-nelayan kita yang kecil, tapi pada saat yang sama juga diberikan kepada koperasi atau apa nanti itu agar nelayan kita bisa wilayah tangkapnya lebih besar dengan kapal 30 GT.

Demikian untuk Dirjen Peningkatan Budidaya, tingkat produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 sebesar 19,47 ton dengan nilai tukar nelayan sebesar 102 dengan pagu anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini sejak 2017 sampai 2020 termasuk target 2021 itu mengalami penurunan. Pada tahun 2017 hasil budidaya kita itu 22,79 ton sampai tahun sampai tahun 2020 berkurang menjadi 18,44 juta ton. Ini mohon penjelasan kenapa dengan meningkatnya anggaran malah produksi kita kemudian menjadi turun. Untuk itu, saya juga mengusulkan nanti agar memperbanyak atau mungkin KKP bisa memperbanyak pembangunan cluster kawasan sentra produksi perikanan budidaya, terutama daerah-daerah yang jauh dari laut. Mungkin itu Pak Ketua, sambil kita mungkin apa menambah program-program untuk kesejahteraan masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Tenang saja Pak, tadi sudah ngomong nanti untuk bantuan sosial yang dampak covid pasti dapat lagi. Selanjutnya Pak Ichsan Firdaus.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Terima kasih Ketua.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Sekjen, para Bapak dan Ibu Eselon I dan yang hadir di ruangan ini, Pimpinan dan Anggota, Bapak dan Ibu semua.

Saya ada beberapa hal, yang pertama adalah terkait dengan operasional SKPT, hampir semua Direktorat Jenderal inikan punya operasional SKPT. Operasional SKPT menurut saya ini kita perlu pengurangan, karena saya lihat memang tidak ada pengembangan SKPT tetapi lebih banyak pada persoalan operasional. Nah, ini apa namanya Kelautan dan Perikanan terpadu sentra. Nah, jadi ini yang kita perlu apa namanya perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi kembali.

Yang kedua, saya setuju dengan Pak Johan tadi terkait dengan revitalisasi dan modernisasi tambak ini, Pak Johan ya tadi. Tapi problemnya adalah di beberapa daerah ini ada hal yang kendala seperti yang saya dengar ini misalnya di daerahnya Pak Khalid, Aceh Timur banyak sekali kawasan-kawasan tambak yang tidak punya, tidak termodernisas. Kemudian perlu ada upaya-upaya untuk melakukan modernisasi dan revitalisasi tambak, misalnya terjadi pendangkalan ya kita harus cari caranya. Misalnya kalau kemudian pembuatan tambak baru ya kita harus cari caranya Pak. Ambil contoh misalnya bagaimana kemudian kita yang sifatnya tradisional kita ubah menjadi modern. Banyak hal mungkin Pak Dirjen Budidaya lebih paham bagaimana kemudian mengelola revitalisasi dan modernisasi tambak.

Yang terakhir Pak Ketua, saya ingin bertanya terkait dengan program yang menggunakan anggaran loan, yang ada di Kementerian KKP. Mungkin ini belum disampaikan ke kita mana saja yang sudah running, mana saja yang masih planning, mana saja yang akan dilakukan di 2021, yang sedang berjalan di 2020, yang akan dilakukan di 2021 ataupun yang perencanaan untuk kemudian mendapatkan loan, entah di tahun berapa. Kita minta agar itu bisa disampaikan sehingga kemudian kami tahu, karena bagaimanapun Pak Ketua yang namanya loan itu kan masih tetap dalam rezim keuangan negara, begitu Pak Ketua Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, itu tolong disampaikan pada kami sehingga kami bisa mudah untuk mengawasinya.

Itu saja Bapak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Ichsan.

Selanjutnya Bapak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua, Anggota Dewan yang terhormat dan Pak Sekjen dan para Dirjen.

Saya kira tidak banyak yang ingin saya kritisi. Yang pertama, bahwa sejauh kita berpegang pada prioritas nasional dan sekaligus tema APBN kita 2021, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, saya kira platform kita sama. Saya kira program-program fisik yang pembangunannya tidak berhubungan langsung terhadap manfaat dalam rangka peningkatan NTP nelayan, saya kira tidak kita jadi kan proritas dulu, karena memang kondisi covid ini memang kebutuhan masyarakat kita sangat tinggi. Dengan demikian dalam rangka memutar pemulihan ekonomi juga stimulus-stimulus yang memang perlu kita berikan kepada masyarakat kita.

Yang kedua, kondisi wilayah perlu dipahami berbeda karakteristiknya. Walaupun di dalam sajian ini yang saya melihat bahwa sudah terbagi ke wilayah-wilayah, hanya memang mungkin oleh Bapak-bapak yang ada di KKP belum memahami secara menyeluruh terhadap kondisi wilayah di masing-masing Dapil kita. Oleh karena itu, mungkin saya akan berikan beberapa saran pertimbangan nanti, tapi tidak di sini mungkin saya kasih dalam bentuk program. Sehingga demikian apa namanya program itu betul-betul menyangkut kepada kebutuhan masyarakat, karena walaupun tidak berikan tapi bukan kebutuhannya saya kira itulah banyak program yang tidak berkelanjutan. Nanti pada saat pembinaan pada saat apa namanya tapi karena bukan kulturnya, sehingga berhenti sampai disitu. Setelah selesai pendampingan maka selesailah program itu, karena memang bukan kulturnya. Olehnya itu kita tentu sesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing wilayah. Katakan seperti Sulawesi Barat, maka memang kamo berada pada kisaran di laut, kami adalah pelaut. Dengan demikian kultur kami pelaut dan tentu berada ditangkap.

Yang selanjutnya terhadap DAK saya juga garis bawahi kembali apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, selain memperhatikan kebutuhan Pemerintah Daerah atau pengajuan Pemerintah Daerah perlu juga di dengarkan rekomendasinya dari teman-teman Komisi IV DPR RI, sehingga dengan demikian kita juga ada wibawa lah, kira-kira begitu di daerah bahwa DAK Perikanan ini atas rekomendasi, saya kira begitu. Begitu Pak Slamet Madura ya, sebagaimana yang di sampaikan tadi kepada saya.

Demikian, terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Suhardi Duka.

Selanjutnya Mbak Riezky Aprilia.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepada yang terhormat Bapak Sekjen beserta jajaran.

Sedikit ingin saya sampaikan teknis terkait di paparan Dirjen PDS, saya ingin mengoreksi terutama untuk Bapak Irjen. Di halaman 6, ada poin 13 pasar ikan modern dari awal masa sidang sampai mungkin sebelumnya juga saya termasuk yang selalu mengoreksi, bahwa untuk fisik mungkin di postpone terlebih dahulu terutama yang mungkin terindikasi Pak. Saya yakin Bapak mungkin paham itu maksud saya terindikasi, bahwa ada hal-hal yang mungkin belum tuntas terkait temuan-temuan, baik di BPK ataupun lembaga lainnya. Nah, terlebih lagi di sini pasar ikan modern ini hanya satu unit. Nah, peletakannya di mana kalau saya tidak salah lihat di paparan juga wilayahnya itu di salah satu di wilayah Jawa Barat. Jadi sekedar saran Pak, apabila memungkinkan saya mohon dengan segala rasa hormat saya dari Sumatera Selatan, saya yakin Pak Menteri tahulah pasar ikan modern juga di situ saja sampai sekarang masih bermasalah. Jadi mohon dipertimbangkan kembali apabila ini mau di paksakan jalan.

Kemudian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, terkait tadi apa integrated aquarium and marine research institute coba dikoreksi ulang Bapak Dirjen dan Bapak Sekjen, kegiatan pendukung dan di atas ada kegiatan rutin. Apabila memungkinkan untuk dikurangi ya silakan mungkin Bapak lebih paham di mana, di posisi mana yang harus lebih urgent untuk diperjuangkan, kan begitu.

Nah, kemudian ini masih hot karena sebelum dengan Bapak-Bapak dari KKP, Bapak dan Ibu di KKP, kami juga rapat dengan mitra kami juga yang lain terkait program mangrove. Memang kami tahu ini masuk di program nasional, prioritas nasional, hanya kami tadi mempertanyakan dengan mitra yang sebelumnya juga kalau boleh sebut merk LHK, di mana posisi LHK, di mana posisi KKP, karena luasan yang sama angka dalam bentuk nominal yang berbeda. Kami kan jangan sampai ada tumpang tindih, masyarakat sedang membutuhkan kita hari ini, apabila memungkinkan memang lebih baik seperti senior saya Pak Mindo sampaikan, lebih baik kita bekerja buat masyarakat hari ini mendorong program-program yang berbicara konteksnya mungkin padat karya atau seperti apa yang mungkin Bapak-bapak lebih paham teknis di lapangan seperti apa.

Nah, jadi silvofishery ya mangrove silvofishery waktu itu memang saya ingat Pak Menteri pernah memaparkan kurang lebih konsepnya sama hanya yang kami pertanyakan pemetaannya, karena luasannya juga sama, angkanya berbeda, jangan sampai ternyata kalau tadi saya lihat peta, saya rasa saya tadi tanya sama Bapak Mindo, "Pak, mangrove ini kayaknya lokasinya pasti di situ juga di pesisir atau di mana", jangan sampai terjadi tumpang tindih.

Nah, terakhir terakhir Bapak-bapak kami dari Komisi IV DPR RI mendorong agar program-program kita ini lebih banyak manfaatnya lah kalau bisa yang berdampak langsung kepada masyarakat hari ini dan kami di Komisi IV DPR RI ini ingin membantu sebagai perantara agar serapan Bapak-bapak juga maksimal dan kita juga ke depannya bekerja sama dengan baik dan terhormat.

Demikian dari saya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Kiki sudah pasti kalau mangrove di tanamnya di pesisir, tidak mungkin di Jalan Jendral Sudirman.

Selanjutnya Pak Abdullah Tuasikal.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, rekan-rekan Anggota DPR RI Komisi IV, Bapak Sekjen dan para Dirjen.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya mau katakan bahwa dan hampir setiap rapat selalu katakan buah Maluku memiliki potensi ikan. Daerah-daerah lain pun demikian, tapi saya mencoba membaca program yang ada ini kelihatannya hampir Maluku ini tidak ada. Saya mau ingatkan saja hampir Maluku tidak ada. Saya lihat di Dirjen Tangkap, Sumber Daya di samping yang lain-lain saya kira hampir itu. Pak Sekjen beserta rombongan, hampir semua Ditjen itu baru dari Maluku. Dan disana pun masyarakat Maluku sangat bangga karena kehadiran Pak Menteri beserta rombongan. Apa yang menjadi harapan masyarakat Maluku, salah satunya adalah perhatian terhadap NTP 715 ya itu perhatiannya kesitu. Untuk itu saya minta ini menjadi perhatian agar janji kita di masyarakat Maluku dia tidak menjadi polemik.

Masalah Maluku memiliki watak lain dan sampai sekarang itu masyarakat Maluku selalu komitmen dengan NKRI. 8 provinsi yang

menghadirkan Republik Indonesia salah satu adalah Maluku. Maluku memiliki potensi cuma satu itu saja, tapi kok tidak ada perhatian. Maluku, Maluku Utara, Papua, NTT dan NTB kok sampai sekarang belum ada sentuhan-sentuhan itu. Kita sampai di Maluku juga ada minimal ada komitmen untuk lumbung ikan nasional, tapi di sini juga tidak ada gambaran itu. Saya mengharapkan agar dalam kegiatan 2021 itu mudah-mudahan ada sedikit saja kelihatan supaya masyarakat Maluku tahu bahwa dukungan dari Kementerian KKP itu benar-benar itu akan terwujud. Untuk itu kita mengharapkan, masyarakat mengharapkan agar satu program yang ada yang menarik itu adalah mewujudkan pelabuhan perikanan terintegrasi dan bertaraf Internasional.

Kita tidak minta apa-apa, kita minta ini menjadi gambaran dan dukungan rencana anggaran 2021 itu juga tergambar sekitar satu koma sekian, di samping Natuna dan lain-lainnya, tapi mungkin gambaran itu mungkin belum ada disini, cuman kami mengharapkan satu itu saja, pelabuhan terintegrasi tingkat internasional. Nanti kalau yang lain-lain Bapak Pimpinan, saya kira kita nanti akan mencoba berhubungan dengan Dirjen terkait itu agar Maluku juga bisa disejajarkan dengan kepentingan-kepentingan kita pada Dapil di 34 provinsi ini.

Saya kira demikian Pak Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi Bapak Tuastikal cuman mintanya satu saja, pelabuhan terintegrasi. Pak Dirjen Tangkap, kira-kira itu dananya berapa kalau pelabuhan gitu, wah banyak sekali 1 triliun. Saya pikir cuman 100 miliar, kalau 100 miliar saya paksakan untuk multi year 3 tahun. Tapi kalau 1 triliun ya saya serahkan kepada Sekjen nanti.

Selanjutnya Bapak Dr. Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Ketua.

Pimpinan, Anggota dan Sekjen dan Dirjen KKP yang hadir.

Secara prinsip inikan program berulang, artinya tidak ada inovasi atupun juga mungkin kita hanya menghadapi masalah distribusi dan pemerataan saja Pak Ketua. Nah, tentunya saya juga berterima kasih pada Kementerian bahwa selama ini telah mengalokasikan berbagai bentuk program kepada berbasis masyarakat. Saya berharap bantuan yang

berbasis masyarakat ini bisa ditindaklanjuti lebih dalam lagi, terutama hal-hal yang menyentuh kebutuhan masyarakat langsung terkait dengan misalnya beberapa waktu yang lalu kita mendistribusikan ada gemar ikan, ada bulan mutu. Saya pikir ini baiknya ini harus berulang dalam ritme waktu tertentu atau terjadwal, jangan hanya sekali tapi setelah itu tidak ada lagi. Saya berharap demikian.

Kemudian saya langsung pada persoalan yang dikaitkan dengan program kita 2021 itu untuk Dirjen Perikanan Budidaya. Saya berterima kasih kepada Dirjen karena telah banyak membantu daerah-daerah dan sangat terbantu sekali daerah ini. Disini ada alat berat eskavator ini untuk wilayah Sumatera Barat saya minta ini harus ada juga dialokasikan, karena ada berapa kelompok masyarakat ini menghendaki adanya alat ini atau juga dinas juga pernah bicara tentang hal ini, karena ini terkait dengan soal pengolahan kolamnya, karena di beberapa tempat ada yang dibutuhkan.

Kemudian terkait dengan bioflok, saya rasa ini sudah cukup memadai tapi saya ingin juga ada distribusi untuk Kota Padang, karena di sini hanya ada 5 daerah, tapi saya usulkan supaya juga ada untuk Kota Padang.

KETUA RAPAT:

Pak Slamet, setahu saya bioflok kan tiap anggota dapat berapa? 5 ya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Tapi Pimpinan, catatan saya sama dengan Bapak Hermanto ini, Kabupaten Sukabumi juga tidak ada Pak, di data slide yang saya baca.

KETUA RAPAT:

Jadi mungkin gini Pak Slamet, di masuknya cuman Provinsi saja. Seharusnya per Anggota per Kabupaten, maksudnya mungkin di masukin per provinsi yang dapat cuman Pak Ono karena temannya beliau. Jadi per Anggota Pak Slamet bukan per kabupaten atau provinsi. Jadi per Anggota untuk aspirasi masyarakat tetap harus di siapkan ya.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASTIKAL, M.Si.):

Pak, kayaknya Maluku tidak ada Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Slamet tolong nanti waktu sebelum Rapat Kerja saya minta datanya untuk saya distribusikan kepada Anggota saya. Takutnya Anggota saya marah nanti tidak pada datang rapat saya repot Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua, saya mencermati ada KJA Budidaya Laut. Ini ada 140 paket, tapi lokasinya di Kepulauan Mentawai. Saya tidak tahu berapa jumlahnya tapi saya ingin juga ada distribusi KJA Laut ini di daerah pesisir selatan, daerah pesisir selatan. Karena kalau di Mentawai ini kadang-kadang kita juga sulit untuk melakukan pengawasan. Saya pernah dengan Dirjen Tangkap waktu itu kesana ya dengan Bapak Tio, itu perjuangannya untuk kesana itu luar biasa. Jadi kalau agak distribusi kita kita mengawasinya.

Kemudian juga terkait dengan pakan mandiri Pak Dirjen, ini ada bantuan mesin dan bahan baku pakan mandiri. Saya ingin berterima kasih sekali karenanya di butuhkan. Hanya saya ingin supaya distribusinya untuk Sumatera Barat selain dari ada pesisir selatan, Solok Selatan, saya minta juga ada di Damas Raya, karena di sini Damas Raya belum tercantum. Kemudian juga, yaitu untuk budidaya, kemudian untuk Tangkap, di sini ada kapal perikanan ukuran 5 GT, saya ini berterima kasih sekali ada alokasi program yang terkait dengan ukuran kapal 5 GT, karena ini adalah menyentuh langsung ya kepada nelayan kelas masyarakat yang paling bawah. Nah, ini tentunya ini sudah terdistribusi ada Pasaman Barat, ada pesisir selatan, tapi saya minta juga ada distribusi di Kota Padang.

KETUA RAPAT:

Pak Hermanto cukup.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Satu lagi Pak Ketua, kemudian terkait juga dengan alat penangkap ikan. Ini ada 1.500 paket ada distribusi di Sumatera Barat, tapi di sini ada Pasaman Barat dan ada Pesisir Selatan. Saya minta di Kota Padang juga ada Pak.

Demikian Pak Ketua, ini untuk 2021 ya Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Saya tahu, jadi gini misalnya satu Anggota dapat dua, kabupatennya mau dipindah ya monggo silakan. Tapi jangan minta tambah, kalau minta tambah nanti yang lainnya marah lagi.

Bapak dan Ibu sekalian.

Saya tawarkan apa kita break sholat Magrib atau lanjut, kalau lanjut Magribnya bergantian, kalau mau sholat silakan. Jadi bagaimana? Lanjut. Kementerian? Karena waktunya kan sayang mepet, tapi sholat juga wajib.

Selanjutnya Bapak Slamet bebek.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Anggota yang saya hormati,
Beserta Bapak Sekjen berikut juga dengan jajarannya.

Yang pertama, saya ingin menyoroti di Dirjen PDS terkait adanya *portable cold storage* ini berbasis reefer container ini butuh penambahan Pak, kenapa saya katakan karena program ini perlu untuk memenuhi kebutuhan nelayan yang sifatnya bergerak, sehingga mampu untuk menjangkau kawasan nelayan terpencil. Nah, dari mana anggarannya untuk penambahannya. Kalau boleh saya sarankan di *integrated cold storage* ini perlu dikurangi Pak, karena kami rasa dari 4 unit ini lebih pada proyek oriented. Itu yang kedua.

KETUA RAPAT:

Maksudnya proyek oriented itu apa, jelaskan karena Bapak Sekjen tidak ngerti ini, coba apa.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Kayaknya Bapak Sekjen sudah tahu Ketua, cuman sekilas saya sampaikan Pak Ketua, karena memang *cold storage* yang bersifat portable ini jauh lebih menjangkau kepada para nelayan dari pada kepentingan kita untuk meningkatkan *integrated cold storage* ini, seperti itu Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Slamet, yang portable itu yang dibawa-bawa maksudnya.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Iya Pak Ketua, yang mudah dibawa ke mana-mana, digendong itu Ketua.

Yang kedua, terkait masalah mobil refregasi ataupun berpendingin ini ada 18 unit Pak. Kami rasa terkait anggaran di 2021 ini juga dikurangi karena banyak mobil ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, mending dialihkan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat dan pro terhadap para nelayan.

Ketiga, terkait ini ada pasar bertaraf internasional ini perlu pendalaman dan kejelasan terkait masalah major project itu seperti apa Bapak Sekjen. Yang keempat, saya ingin mempertanyakan terkait masalah titik gemar ikan Pak. Jadi gemar ikan ini kemarin saya mendapatkan dua titik, anggaran per titik itu 65 juta dengan kapasitas peserta 500, sedangkan anggaran di sini adalah 194 betul tidak? jadi kita dua titik dan dibayar hanya satu titik sampai hari ini Pak. Mohon dikroscek kepada yang membidangi tentang gemar ikan apakah ini hanya terjadi pada kami atau kepada teman-teman yang lain. Jadi kami itu dapat dua titik, per titiknya anggarannya 65 juta Pak, jadi baru dibayar hari ini 65 juta. Nah, setelah saya klarifikasi kepada teman-teman anggarannya itu kalau tidak keliru per titiknya 170 ya setelah dikurangi pajak.

Dan berkaitan tentang gemar ikan ini, saya mengapresiasi. Namun kita perlu di tambahkan dari awalnya ini ada 84 lokasi kita tingkatkan lagi karena ini sangat berdampak. Dari mana kita ini perlu menambahkan, ini ada satu sentral pasar modern Pak, yang lumayan besar 25 miliar ini kami rasa ini manfaatnya kurang, karena ini hanya satu titik 25 miliar lebih baik ditingkatkan menjadi program yang sifatnya langsung kepada masyarakat.

Yang terakhir terkait masalah *chest freezer* ini perlu dilakukan klarifikasi, karena kami kemarin juga dari Dapil mengusulkan ini karena kami di Madura tidak ada, jadi kami juga enggak dapat. Kalau boleh ini mohon untuk bisa berbasis Dapil yang ada lautnya atau pulaunya Pak. Yang kedua terkait masalah.

KETUA RAPAT:

Tadi katanya terakhir, sekarang yang kedua, mana yang benar.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Ini di Dirjen PDS Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya ngomong jangan terakhir dong.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Ya, mohon maaf saya salah Ketua.

Terkait masalah Dirjen Perikanan Tangkap, ini seakan-akan yang peduli terhadap Madura ini hanya Pak Saini sebagai Dirjen Perikanan Tangkap ini. Saya lihat dan saya apresiasi bahwasanya Madura sudah masuk cluster yang sudah dipertimbangkan oleh Bapak Dirjen baru ini, mudah-mudahan nanti diangkat menjadi Dirjen beneran ya bukan hanya PLT, kan sekarang masih PLT.

KETUA RAPAT:

Siapa yang PLT?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Pelaksana tugas Pak Saini.

KETUA RAPAT:

Loh itukan sekampung sama kamu?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Iya, makanya saya sangat mengapresiasi Ketua, karena beliau pro betul terhadap orang Madura ini yang perlu saya banggakan kepada beliau. Jadi saya pertanyakan komitmen dari Dirjen-Dirjen lainnya ini apakah perlu Madura ini merdeka Ketua, minta Merdeka. Saya bicara sudah 1 tahun panjang lebar memperjuangkan Dapil tapi belum pernah ada yang mendengarkan secara konkrit. Baru hari ini kita kedatangan Dirjen baru sebagai pahlawan bagi Madura ini perlu kita perjuangkan betulan Ketua, tapi jangan salahkan kami ketika Madura nanti minta merdeka.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Slamet bicara merdeka, giliran dapat program garam dari Ario 45 miliar tidak ngomong. Saya sebaga Ketua Komisi, satu Rupiah tidak dapat programnya. Dari Ario dapat 45 miliar dia tidak ngomong, tidak minta merdeka. Tidak boleh minta merdeka loh, berarti anda tidak NKRI, jangan ngikutin yang lain. Selanjutnya Pak Slamet dari Sukabumi, silakan Pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua, rekan-rekan Anggota yang saya hormati,
Bapak Sekjen beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Sedikit saja menguatkan tadi apa yang disampaikan Bapak Ketua, Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen, bahwa mohon program yang memang disepakati untuk menjadi aspirasi ke daerah tadi dikuatkan oleh Bapak Ketua, agar listnya masuk sebelum itu karena beberapa titik saya lihat kayak bioflok kemudian beberapa itu di Jawa Barat Sukabumi itu tidak ada,

betul tadi yang disampaikan hanya sekitar Subang, kemudian Pak Ono dan lain-lain. Ini catatan saya.

Kemudian saya juga memberikan masukan program pembangunan perikanan budidaya. Sukabumi juga potensi Pak, pasti tahu Pak Slamet dan juga semuanya disana ada BPAT tetapi saya melihat program untuk pembangunan perikanan budidaya di Sukabumi juga tidak ada ini. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan untuk anggaran 2021. Nah, satu saja saya juga itu terkait dengan pelatihan kemarin, pertama menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan pelatihan, hanya terus terang betul kita perlu follow up Pak, jadi apakah nanti follow up-nya dalam bentuk support peralatan atau apa yang jelas terkait juga dengan program pemulihan ekonomi nasional saya pikir ini penting. Mungkin tidak bisa semuanya dalam yang dilatih, tetapi ada yang bisa di-follow dalam bentuk apapun. Itu mungkin masukkan sedikit Pak Ketua, terima kasih atas waktunya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih Bapak Slamet.

Selanjutnya Bapak Sutrisno yang virtual, singkat dan jelas Pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Yang pertama Pak Sekjen, itu apa namanya sifatnya kan nasional kalau Kementerian bukan seperti di Pemerintah Daerah, hanya saja sebarannya kok kecil-kecil. Kemudian alokasinya pun juga kabupaten kota itu-itu saja dari awal buka-buka satu buku dengan buku yang itu-itu saja, sebut saja seperti Jawa Barat, Karawang dan Karawang dari awal sampai akhir. Kemudian sepertinya Pak Sekjen, para pejabat di KKP ini belum mengenal 54 para Anggota Dewan yang mengawal kegiatan program kepentingan rakyat di Dapilnya masing-masing. Seperti di Ditjen Penguatan Daya Saing, cold storage tadi disampaikan oleh Bapak Slamet hanya 1 unit, padahal juga kami mengusulkan untuk masyarakat nelayan Blanakan satu unit cold storage untuk ukuran 50 sampai dengan 100 ton. Itu kemudian gemar ikan Pak Sekjen, kita punya 54 saya saja dapat dua tempat kemarin sekarang hanya 84 menurun daripada tahun yang kemarin. Bakti nelayan hanya ada 20 lokasi, kan minimal masing-masing Anggota juga bisa mengawal Bakti Nelayan itu.

Kemudian yang kedua, wajar rakyat ini sepertinya marah Bapak Sekjen. Saya berkali-kali menyampaikan permasalahan Patimban yang kena dampak pelabuhan laut internasional itu yang aktifitas usahanya pun juga tergeser minta bantuan fasilitas tidak ada kapal 5 GT, tidak ada alat penangkap ikan, ini mohon untuk diperhatikan. Jangan kemudian rakyat

semakin marah, sudah tergeser usahanya, yang diminta pun juga tidak dipenuhi.

Kemudian Ditjen Pembudidaya, tiap tahun benih ikan 217 juta tapi pendapatan pembudidaya ikan tidak pernah bertambah, tiap bulannya hanya 3,5 juta kemana itu. Artinya apa, apakahakan terus-terus padahal programnya paling utama di pembenihan ikan. Kemudian premi asuransi nelayan, ada 120 ribu tarifnya hanya 180 di Ditjen Tangkap, di Dirjen Pembudidaya 5000 orang tarifnya 700, kenapa berbeda antara Ditjen Tangkap dengan Ditjen Pembudidaya. Kemudian fasilitas kredit perikanan, kok saya dengan masyarakat bahkan nantangin masyarakat saya anterin ke bank manakala ingin mendapatkan bantuan permodalan, tapi buka-buka hanya ada fasilitas kredit untuk perikanan tangkap. Apakah memang yang 3% itu hanya untuk perikanan tangkap, sedangkan saya mensosialisasikan kepada berbagai macam usaha perikanan yang ada, ini juga mohon penjelasan.

Kemudian dari Ditjen apa namanya Daya Saing, saya pernah mengusulkan satu mobil pendingin di Majalengka itu satu harinya 7 ton itu ngangkut dari kerongsongan Indramayu tentunya membusuk itu apa namanya bahannya. Oleh karena itu, mohon dibantu supaya juga bahannya kuat untuk diolah jadi makanan dari ikan.

Saya kira itu Pak Ketua, yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT:

Pak Sutrisno, mungkin yang dimaksudkan Pak Sutrisno itu asuransi nelayan itu adalah nelayan yang ke laut. Asuransi budidaya itu beda sama juga dengan asuransi pertanian, kalau gagal dapat gantinya sekian.

Selanjutnya Pak Mindo Sianipar.

F-PDIP (MINDO SIANIPAR):

Terima kasih Bapak Ketua.

Pak Sekjen serta para Dirjen yang saya hormati.

Mungkin gak ya kita dalam membuat rancangan itu ada pemilahan yang jelas begitu. Pertama, pemilihan yang jelas itu tidak atas dasar daerah pemilihan, karena kami ini Anggota DPR, DPR Republik Indonesia. Tapi melihat potensinya sehingga programnya diarahkan sesuai potensi yang ada di sana. Contoh misalnya kalau kita mendengar atau orang berbicara soal Maluku itu sudah berarti laut. Dulu pernah dicanangkan memang perairan Maluku itu sebagai lumbung pangan nasional. Jadi wajar saja kalau rakyat Maluku itu menunggu kapan realisasinya itu. Kalau tidak salah saya juga Migas sudah jelas dalam undang-undangnya bagi

hasilnya, tembakau pun ada ya walaupun menurut saya tembakau itu kurang fair dibagikan kepada masyarakat di Kediri, di Malang, penghasil rokok, padahal korban rokok itu se-Indonesia Raya, yang membeli rokok itu se-Indonesia Raya, kan begitu ya menurut saya kurang fair itu. Nah, ikan jelas daerah-daerahnya sumber ikan di Indonesia. Jadi kalau permintaan Bapak Abdullah Tuastikal sesuatu yang harus kita perhatikan dalam bentuk apa bisa itu.

Selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian, Doktor apa tadi saya lupa terus yang nama Doktor PKS ini, Hermanto ojo diborong semua kan begitu ya. Jadi seperti saya ini ya kalau mau melihat itu lihat daerahnya itu daerah perikanan air tawar kah, perkotaan kah, atau kelautan. Jadi kalau misalnya banyak lautnya itu wajar lah diberikan, untuk di daerah-daerah seperti Ambon, Manado, Makassar, itu nggak perlu dikasih program gemar makan ikan karena mereka memang makan ikan terus. Yang perlu diberikan itukan di Dapil saya misalnya di Jombang, di Nganjuk, supaya betul-betul gemar makan ikan, supaya hilang lama-lama iwak tempe, iwak tahu, jadi tempe sama tahu jadi iwak jadi ikan, kan begitu. Nah, jadi digantikan apa? program tetap masuk ke sana tapi dalam bentuk yang lain, tidak harus seperti itu. Kalau kesan saya pemahaman kita semua kalau bioflok itu yang bulat itu dianggap, kolam yang bulat itu dan isinya lele. Jadi mungkin Pak Dirjen Budidaya di biasakan terminologinya adalah bio yang ngeflok supaya paham. Bukan kolam bulat itu bioflok, prosesnya bio yang ngeflok disingkat bioflok. Saya khawatir banyak kita juga yang tidak ingat itu ya.

Nah, yang seperti itu di kasih ikan lele ya saya khawatir dari 100 orang-orang Ambon seperti Pak Abdullah ini belum tentu ada 15 orang yang gemar makan lele. Kalau Pak Abdullah Tuasikal karena istrinya sudah orang Jawa dia sudah suka makan pecel lele. Nah, jadi kita bilang seperti itu supaya memang lebih merata, baru masuk lah nanti ke daerah-daerah dari mana teman-teman di sini. Mengapa? Karena Anggota DPR itu juga bisa mengawal program itu, supaya efektif boleh masuk ke daerah-daerah seperti itu.

Saya kira itu saja sumbang pikiran saya Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mindo.

Selanjutnya yang mulia Pak Budisatrio silakan Pimpinan Komisi IV DPR RI.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak Sekjen, para Eselon I KKP yang saya hormati.

Cepat saja saya menyoroti hanya 3 Ditjen yang ada di KKP, yang pertama Budidaya kita ketahui bahwa program ikan budidaya ini adalah salah satu program prioritas dari Pemerintahan dan juga arahan dari Presiden. Oleh sebab itu, Bapak Sekjen dan Pak Dirjen Budidaya mohon diperhatikan potensi-potensi yang kemungkinan ada di Kalimantan Timur. Saya tahu bahwa ada rencana besar untuk merevitalisasi tambak udang, saya minta kalau bisa Provinsi Kaltim itu menjadi provinsi yang dipertimbangkan untuk dibangun tambak udang ataupun revitalisasi tambak-tambak masyarakat yang ada. Lahannya cukup luas dan kualitas air untuk pertambakan udang itu cukup baik Pak Dirjen.

Begitu juga untuk pakan mandiri beberapa waktu lalu saya mengadakan Reses dengan kelompok-kelompok ikan budidaya, mereka banyak sekali mengeluhkan keterbatasan dan kemahalan juga biaya yang mereka harus keluarkan untuk makan bagi budidaya mereka. Untuk itu, saya mohon juga Kaltim itu nanti menerima bantuan untuk pembangunan pakan mandiri, karena saya lihat di program kerja Dirjen Budidaya, Kaltim itu belum masuk untuk pakan mandiri. Untuk bioflok dan lain sebagainya saya kira ini program-program yang baik. Semoga ini juga bisa ditingkatkan ke depannya. Dan saya rasa saya sepakat juga tadi Pak Mindo, ada baiknya kita melihat potensi-potensi wilayah dan kita perkuat apa yang mungkin belum kuat dan bagi yang sudah kita prioritaskan untuk mungkin di tempat-tempat lain.

Kedua adalah BRSDM Pak Syarif, kemarin kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Saya rasa sebagai masukan dari saya program-program ini cukup baik ya moga-moga 2021 sebagai mitigasi akibat dampak dari covid-19 yang begitu lama kita tidak tahu sampai kapan ini bisa menjadi program-program andalan, pelatihan-pelatihan khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Dapil maupun di mana pun mereka berada, karena memang manfaatnya cukup baik. Dan Kemarin saya diskusi sama kelompok-kelompok pembudidaya di Kaltim, mereka sangat senang mendapatkan pelatihan ini. Semoga ke depannya ini bisa diperkuat syukur-syukur bisa diperbanyak lagi.

Terakhir saya ingin menyoroti kepada Dirjen Tangkap. Saya cuman ingin mengingatkan bahwa harapan masyarakat dan khususnya Komisi IV DPR RI terhadap Dirjen Tangkap ini sangat-sangat besar. Saya tidak ingin yang dahulu-dahulu itu terjadi lagi. Harapan masyarakat kepada Dirjen Tangkap apalagi bantuan-bantuan alat tangkap termasuk kapal tangkap dan alat-alat untuk perikanan lainnya ini sangat diharapkan. Semoga dengan perencanaan yang baik nanti Dirjen Tangkap bisa merealisasikan programnya dan masyarakat bisa sangat menikmati manfaatnya.

Saya kira demikian Pak Ketua.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pimpinan Komisi IV DPR RI Pak Daniel Johan silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terima kasih.

Selamat sore, salam hormat buat Pak Ketua, segenap Pimpinan, segenap Anggota,

Hormat buat Pak Sekjen dan seluruh jajaran.

Pertama, tentu salam untuk Pak Menteri ya Pak Sekjen, agar segera bisa bergabung Rapat Kerja menuntaskan pembahasan RAPBN. Yang kedua adalah sesuai dengan apa yang disampaikan dengan oleh Pak Budi juga, kita mengapresiasi bahwa KKP telah membuat 60 paket bantuan mesin pakan mandiri, tetapi satu hal yang perlu diperhatikan oleh KKP adalah bahan baku untuk membuat pakan itu yang mahal Pak Sekjen, sehingga harus ada terobosan yang dilakukan oleh KKP agar 60 paket mesin tersebut bisa benar-benar bermanfaat, karena kalau misalkan pakannya bahan baku tetap mahal itu akan tetap membebani para pembudidaya terutama ikan air tawar. Sehingga apakah nanti ada program misalkan subsidi pakan bahan baku agar mesin-mesin tersebut bisa efektif atau sebaliknya ada terobosan sehingga bahan baku itu bisa didapat secara mudah dan tidak mahal oleh para pembudidaya.

Nah, yang kedua adalah mohon agar PSDKP itu melakukan pengawasan secara ketat terutama di wilayah Dapil saya di Kalimantan Barat, karena banyak kapal-kapal dari luar daerah yang jauh lebih besar itu memasuki wilayah penangkapan bagi kapal-kapal nelayan di Kalimantan Barat yang jauh lebih kecil, sehingga waktu itu beberapa waktu yang lalu terjadi konflik. Kita berharap pengawasan itu benar-benar sesuai dengan aturan yang ada, di berikan sosialisasi yang baik kepada para nelayan, sehingga tidak terjadi konflik yang tidak perlu.

Yang ketiga adalah saya juga mau protes bahwa program peningkatan daya saing itu sangat baik bagi Dapil-Dapil, karena itu akan meningkatkan nilai tambah, meningkatkan daya beli, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan para nelayan, tetapi saya lihat Dapil saya belum ada Pak. Jadi Mohon diperhatikan ya Pak Sekjen.

Terakhir, respon dari seluruh Dapil atas kegiatan gemar ikan sangat baik, karena itu juga setiap gerakan gemar ikan juga menampung produk-produk lokal dari turunan apa hilirisasi dari apa yang dihasilkan oleh para nelayan setempat. Kita mendorong agar kegiatan gemar ikan itu bisa diperkuat, bisa diperbesar, saya rasa minimal mesti ada 500 kegiatan yang mempunyai dampak yang baik.

Sementara itu Pak Ketua, Pak Sekjen.

Terima kasih, selamat sore.

KETUA RAPAT:

Sebetulnya yang lebih penting bukan bahan baku, kalau bahan baku saya yakin dimana pun gampang dicari, yang penting pelajaran, edukasi untuk yang membuat pakan itu yang lebih penting. Karena kalau bahan baku pakan kan tepung ikan ada, bungkil ada, jagung ada, apa lagi kira-kira. Yang penting pelatihannya ini, misalnya ada alternatif pakan ini kemahalan, di carikan kan kita ada Litbang disini, mana Litbang? kan paling misalnya bungkil kelapa tidak ada di wilayah ini cari misalnya bungkil kelapa sawit atau ampas tahu kan itukan masih bisa, yang penting pelatihannya itu yang paling penting.

Yang terakhir Ibu Alien Mus jangan main handphone saja.

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Itu termasuk terobosannya Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, setuju.

F-PG (ALIEN MUS):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua, Pimpinan bayangan,
Dan juga Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Tentunya Bapak Sekjen, Bapak Irjen, beserta Eselon I dan jajarannya yang saya hormati pula.

Mudah-mudahan kita selalu sehat wal'afiat, aamiin. Saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh beberapa rekan Anggota Komisi IV DPR RI yang sebelumnya, yang tadi sudah disampaikan oleh Ayahanda kami Bapak Mindo. Bahwa kalau kita berbicara soal Kelautan dan Perikanan pastinya kita harus melihat daerah-daerah wilayah yang memang penghasil ikan, baik pun di laut walaupun di darat. Tentunya kita tidak bisa berbicara soal ke samarataan soal kelautan, karena memang masing-masing daerah ada yang memiliki apa lagi di Komisi IV DPR RI ada yang memiliki daerah wilayah yang laut dan juga ada yang tidak sama sekali. Tapi saya hanya menginginkan bahwa program focus anggaran 2021 ini karena saya tahu persis dan kita tahu persis pada saat ini sampai

tahun 2021 kita belum tahu covid-19 ini bisa berakhir atau tidak. Maka dari itu, program tahun 2020-2021 juga harus ada fokus juga untuk mungkin penyediaan untuk penanganan covid, baik untuk di para nelayan khususnya.

Tentunya di daerah-daerah penghasil ikan kita butuhkan cold storage, pabrik es juga penting tapi Pak Sekjen untuk daerah-daerah khususnya tadi yang sesuai Pak Sekjen sampaikan daerah timur itu adalah salah satu alokasi anggaran DAK juga masuk dalam situ, karena Indonesia timur juga bagian kelautan tolong diperhatikan untuk pabrik es juga, tapi itu pabriknya bukan yang ice breaking tapi es balok, es balok karena untuk para nelayan tidak mudah mencair. Terus juga tadi yang sudah di sampaikan cold stored portable itu juga sangat penting karena memang kita tahu sendiri daerah-daerah kepulauan itu ada yang memiliki listrik, ada yang tidak memiliki listrik. Jadi portable cold storage itu sungguh sangat baik sekali untuk para nelayan. Tolong dengan penganggaran ini juga sesuai yang di sampaikan Pak Ichsan kita juga harus mengetahui yang loan dari luar negeri itu program fokus anggarannya untuk apa saja, agar kita juga mengetahui.

Terus sudah disampaikan beberapa Anggota saya nggak perlu sampaikan lagi. Tadi yang sampaikan oleh Pak Abdullah Tuasikal, sangat penting juga karena memang daerah-daerah timur sana khususnya di Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan juga Papua, Papua Barat, masuk NTT, NTB ini adalah wilayah-wilayah penghasil ikan, tapi juga mereka ini kalau mau kirim ikan ke luar negeri atau ekspor memang bermasalah soal pelabuhan untuk ekspornya. Saya merasakan betul karena di daerah saya itu di Maluku Utara ada di Morotai, itu Pulau Morotai sekarang sudah bisa ekspor ikan tuna, tapi memang masalahnya lagi ice begitu, masalahnya lagi pelabuhan yang tidak memadai seperti itu. Maka dari itu saya berharap fokus anggaran DAK ini untuk kabupaten kota yang masuk tadi dalam wilayah Indonesia timur, saya berharap Maluku dan Maluku Utara, NTT dan NTB ini harus masuk dan Papua, Papua Barat ini harus masuk jadi prioritas Dana Alokasi Khusus Ketua, karena mungkin APBN-nya susah karena memang anggarannya kecil, tapi dalam DAK ini tolong diprioritaskan daerah-daerah tersebut.

Saya juga ada membawa aspirasi sudah masuk ke Dirjen KKP, juga sudah ditandatangani, tapi ini saya kasih langsung saja ini amanah, amanah juga sudah di sampaikan ke Pak Ketua Komisi dan Pak Menteri dan saya langsung lagi ke Pak Sekjen.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, nanti serahkannya setelah selesai.

F-PG (ALIEN MUS):

Baik, itu saja terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi teman-teman Eselon I saya ini bingung Kementerian Kelautan dan Perikanan kok belinya mesin ice flake, ice flake itu kan hanya untuk di supermarket, pendingin. Coba saya ingin ngerti teknis, kalau membuat ice flake itu minus berapa jadinya, siapa yang paham? Minus berapa untuk menjadi ice flake sampe es batu.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ijin Pak, untuk yang ice flake ini memang peruntukannya untuk pemasaran, suhunya minus 5 Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau ice flake antara 3-5 sudah jadi beku, tapi kalau untuk es batu minimal 10 sampai 12. Betul tidak? karena saya mohon maaf tahun 70 Bapak saya sudah punya pabrik es batu, maka saya tahu. Ice flake itu tidak beda kita bikin jaman dulu pabrik es kurang kita bikin es di dalam kulkas, ya sama seperti itu.

Kemudian tadi saya ada titipan dari teman perihal di ruang laut, yaitu Sarpras Wisata Bahari yang cuman 6 unit. Ini kalau bisa ditingkatkan untuk sarana prasarana di beberapa wilayah, nanti di rumuskan saja Kemudian yang paling penting adalah Anggota Komisi IV DPR RI ini ada 54, jadi nggak usah bicara kabupaten, kota, provinsi, pokoknya 54 Anggota. Jadi misalnya ada Bansos bioflok 5 ya terserah Anggotanya mau dibagi kemana, tapi kalau penambah-penambahan janganlah, karenakan anggarannya juga terbatas, yang dibagi juga banyak, mungkin menterinya datang ke suatu ada tuntutan ini, Dirjennya, Sekjennya, "Pak, kami kok nggak dapet program ini Pak", paling tidak ada yang dibagi. Jadi kita juga nggak boleh terlalu egois, jangan mentang-mentang 5, "Oh, kabupaten saya delapan", saya ini Ketua DPD kabupaten saya 15 dapat 3 ya sudah 3 alhamdulillah, cuman dapatnya segitu itu saja.

Demikian pertanyaan, tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Selanjutnya kami persilakan saudara Dirjen atau Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan jawabannya. Saya minta dijawab tetapi juga saya minta tertulis, karena untuk dokumentasi pegangan kami pada saat Rapat Kerja yang akan datang.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota DPR RI yang kami hormati.

Kami akan mencoba menjawab secara highlight saja, masukkan terima kasih, tanggapan, kritik, pengawasan, saran kami terima. Nanti akan saya bacakan dan selanjutnya akan kami jawab secara tertulis yang lebih rinci. Berdasarkan saran dan masukan Pak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI, maka kami akan melakukan perbaikan rincian pagu anggaran sebagai berikut. Untuk Itjen akan dilakukan rasionalisasi kegiatan untuk menambah kegiatan bulan mutu karantina ikan pada BKIPM. Untuk BRSDM akan dilakukan rasionalisasi kegiatan Sarpras, riset kelautan, operasional dan kegiatan pendukung untuk menambah kegiatan bulan mutu karantina ikan dan pembangunan kapal pengawas tipe B tahun pertama pada PSDKP.

Selanjutnya akan kami lakukan penajaman program dan kegiatan pada beberapa Eselon I sesuai dengan pagu anggaran semula, yaitu Dirjen PT akan dilakukan rasionalisasi jumlah dan jenis bantuan kapal dan alat tangkap untuk mendukung penambahan kegiatan infrastruktur pelabuhan perikanan termasuk kegiatan pedalaman alur dan atau pengerukan. Di samping itu untuk kegiatan bakti nelayan akan kami lakukan penambahan lokasi.

Dirjen Budidaya akan dilakukan rasionalisasi anggaran pada kegiatan milenial screen farming pada UPT dan kegiatan pendukung untuk dialihkan pada kegiatan pengadaan dreger dan menambah KJA di wilayah Sumbawa. DJPDS akan dilakukan rasionalisasi pengadaan integrated cold storage menjadi portable cold storage agar lebih optimal dan berdaya guna. Pengadaan mobil berpendingin dan pembangunan pasar ikan modern akan dialihkan untuk menambah kegiatan kampanye gemar ikan untuk lebih memperkuat gerakan masyarakat sehat dan meningkatkan konsumsi ikan. Untuk Dirjen PRL akan dilakukan penajaman kegiatan dengan menambah lokasi desa wisata bahari dan bantuan kelompok masyarakat konservasi. Untuk pengelolaan kawasan konservasi pada 10 UPT dan pusat akan dilakukan rasionalisasi kembali termasuk rasionalisasi kegiatan penanaman mangrove.

Untuk usulan-usulan lokasi kegiatan di kabupaten kota akan menjadi perhatian kami dalam perbaikan penetapan lokasi bantuan Pemerintah. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, untuk yang pertanyaan yang lain nanti akan kami sampaikan secara tertulis. Dan khusus ini saya jawab untuk yang Indonesia timur kami sudah mengajukan itu tambahan pagu alokasi anggaran untuk tahun 2021, yaitu khusus untuk di Maluku Pak, kami minta untuk karena sebagai sudah 11 tahun Maluku ini menunggu sebagai lumbung ikan nasional belum juga terealisasi, sudah berapa menteri mungkin ya, sudah beberapa pejabat yang datang ke sana kita sudah mengajukan Rp1,5 triliun untuk realisasinya. Mudah-mudahan kemungkinan katanya sih ya mudah-mudahan bisa Pak, karena sudah lama. Untuk yang di Natuna itu Rp1 triliun juga terpadu sebagai sentra industri kelautan dan perikanan terpadu Natuna Utara, Maluku Utara maksudnya. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ada Eselon I yang mau menambahkan atau ada Anggota Komisi IV DPR RI yang pendalaman. Silakan Pak Ichsan cukup, Bapak Mindo, Pak Abdullah Tuasikal.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya kira sudah jelas, saya mewakili masyarakat Maluku mengucapkan terima kasih atas penjelasan Pak Sekjen soal lumbung ikan nasional. Mudah-mudahan tahun 2021 bisa jalan dan ini merupakan satu kebanggaan tersendiri untuk masyarakat Maluku.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jangan terima kasih dulu Pak, belum dapat Pak, nanti kalau sudah dapat Bapak baru bilang terima kasih.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Minimal ada niat baik Pak.

KETUA RAPAT:

Oh gitu, kita stress dari pagi kita ketawa-tawa sajalah, kalau ngadepin kelautan, ngadepin kehutanan agak santai sedikit, yang tegang itu besok ngadepin temannya Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Siapa Ketua?

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Dalam diskusi, saran Anggota Komisi IV DPR RI dengan ini saya bacakan kesimpulan rapat.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atas Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp6.652.139.393.000,00 (enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal, sebesar Rp497.646.140.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Inspektorat Jenderal, sebesar Rp93.767.955.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Pak Irjen, Alhamdulillah anda dapatnya besar Pak, karena tadi di LHK dengan anggaran delapan triliun koma sekian cuman Rp70 miliar tidak sampak 1%, makanya tadi saya bilang pulang laporkan sama menteri anda revisi, karena saya tidak mau nanti Inspektorat ini ke Lampung dijemput, diajak makan, dibayarin hotel, diajak karaoke, dikasih oleh-oleh, saya tidak mau, harus punya anggaran yang cukup untuk memeriksa di lapangan.

- c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebesar Rp763.577.487.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sebesar Rp1.212.740.404.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu rupiah);
- e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp978.052.922.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp431.704.028.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebesar Rp455.357.175.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.626.573.626.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
- i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, sebesar Rp592.719.656.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan revisi terhadap Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Saya minta Badan Karantina Perikanan belilah alat, karena kantornya BK IPM Lampung itu sangat bagus dan sangat mewah sekali bangunannya. Sampai saya tawar kepada Kepala Badan Karantina yang kosong boleh tidak saya pakai untuk tempat kos, karena saking banyaknya ruangan kosong,

tempatny ada, peralatanny tidak ada. Yang lebih penting lagi adalah di pelabuhan, terutama Pelabuhan Bakauheni.

Anggota setuju?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai usulan tambahan pagu alokasi anggaran Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.286.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar rupiah).

Anggota?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dengan rincian:
 - a. DAK Provinsi, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. DAK Kabupaten/Kota, sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan informasi kepada Komisi IV DPR RI terkait dengan pemilihan menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 dari Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Begini paling tidak Sekjen, Irjen dan lain-lain kami minta data detail mana saja wilayah yang mendapatkan DAK, karena selama ini kan kami tidak pernah dapat nih. DAK misalnya dibelikan apa juga kami enggak tahu, misalnya diharuskan membeli jaring, kemudian jaringnya pun kita tahu, di bagikan dan tidak di bagikan juga tidak tahu. Karena apakah BPK atau BPKP sanggup sampai ke bawah. Temuannya kan paling tidak tidak gampang sekali itu.

Anggota?

Pemerintah?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua, saya interupsi saja terkait dengan DAK ya tadi Bapak Ketua sudah menyebutkan. Kita memang sebagai Anggota DPR RI itu kan punya fungsi untuk bisa melakukan pengawasan. Sepanjang anggaran adalah berbasis kepada APBN. Jadi menurut saya DAK ini kita harus transparan saja Pak Ketua, supaya kita juga bisa masuk untuk pengawasan.

Demikian Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Maka dari pagi Bapak Hermanto waktu kita dengan LHK pun saya mintakan, ini pun saya mintakan untuk kami bagikan ke Anggota supaya waktu Reses atau pulang Dapil bisa mengecek apakah ada penyimpangan atau tidak. Karena mohon maaf, mohon maaf sekali lagi kadang-kadang ada oknum dinas yang bermain nakal, beli jaring itu bisa 3 minta bonnya, pertama untuk atasan, kedua untuk kantornya, ketiga untuk setoran ke APBN. Saya bukan katanya saya sangat tahu sekali.

4. Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti semua masukan serta saran Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini.

Anggota?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, point nomor 4 Ketua, terkait dengan masukan dari teman-teman itu kan kita perlu tindaklanjuti dengan bahwa setelah ada perubahan sebelum Rapat Kerja kita ingin memastikan bahwa perubahan itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita memberikan masukan kepada Kementerian. Jadi kalau boleh kita kasih batas waktu sebelum Rapat Kerja itu sudah ada kira-kira apa yang sudah di selesaikan oleh Kementerian. Saya usul begitu Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini hari Rabu, saya berharap Jumat sudah ada bahan yang sudah kita sepakati bersama. Begitu Pak Doktor?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Siap Ketua.

KETUA RAPAT:

Kalau S3 memang lebih pintar dari saya Kang.
Setuju ya?

F-PDIP (MINDO SIANIPAR):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Mindo.

F-PDIP (MINDO SIANIPAR):

Tadi saya katakan sudah lama kesepakatan Daerah dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Nasional yang menjadikan Maluku itu menjadi lumbung pangan nasional. Mungkin pada kesempatan ini kita mengendorse, kita memahami dan mendukung Pemerintah sesegera mungkin sesuai dana yang tersedia bla-bla merealisasikannya, kira-kira begitu.

KETUA RAPAT:

Maksudnya ini di tambahkan dalam kesimpulan rapat. Tolong Ichsan, Bapak Doktor dibantu ini tulisannya. Bagaimana Maluku tidak boleh terzolimi karena Maluku tidak akan merdeka, tidak kayak yang tadi ngomong itu.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Siapa yang merdeka Bapak Ketua?

Kalau saran saya gini Ketua, "Komisi IV DPR RI mendesak agar Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merealisasikan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional melalui alokasi anggaran...".

KETUA RAPAT:

Sebetulnya mendesak apa meminta.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Mendesak dong, karena sudah ditetapkan.

KETUA RAPAT:

Kalau mendesak kalau duitnya tidak ada apa yang mau didesak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ya melalui alokasi anggaran pada tahun 2021 gitu saja. Pointnya begini sebenarnya, kan lumbung ikan nasional itu sudah ditetapkan oleh Pemerintah itu sudah 11 tahun. Sampai detik ini menurut Bapak Abdullah Tuasikal itu belum terealisasi, jadi ini sudah mendesak untuk dilakukan. Bukan begitu Bapak Abdullah, bukan begitu Ibu Alien? Saya juru bicara saja kalau begitu. “Merealisasikan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional yang diwujudkan melalui alokasi anggaran pada tahun 2021”.

Jadi Bapak Ketua, salam sama Bapak Gubernur Maluku walaupun dari PDIP tapi yang memperjuangkan Golkar, gitu Bapak Ketua. Mudah-mudahan Bapak Sekjen paham bahwa kita mau koalisi Pak Sekjen.

KETUA RAPAT:

Mungkin tidak kalau yang 4 sama 5 digabung.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Tidak usah tersendiri saja Ketua, ini harus sendiri karena ini program prioritas nasional.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Bapak Irjen.

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dr. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.M.):

Kalau kita lihat kan sumber dana dari point 2, ini tambahan kalimat saja yang peruntukannya antara lain untuk mewujudkan LIN Maluku. Nomor 2 inikan setelah 3,2 yang peruntukan antara lain untuk mewujudkan program LIN di Maulu, gitu Pak. Inikan sudah mengikat ada angkanya disitu Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Kalau itu total untuk LIN semua Pak, 3,26?

IRJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Antara lain Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Antara lain melalui.

KETUA RAPAT:

Tidak usah melalui yang untuk betul itu, untuk wilayah LIN Maluku dan Maluku Utara. Yang nomor 2 tadi tambahkan lagi tadi, kan sudah ada di alokasi anggaran 2021 di atasnya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ternyata lebih cerdas Bapak Irjen daripada saya Pak.

KETUA RAPAT:

Ya lo S3 bodong, beliau pengalamannya lebih banyak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Yang ambil untung Bapak Abdullah Tuastikal sama Ibu Alien ini. Siapa tahu terpilih lagi.

KETUA RAPAT:

Saya ulang lagi nomor 2 supaya jelas jangan ada kesalahan.

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai usulan tambahan pagu alokasi anggaran Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.286.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar rupiah) yang peruntukannya, antara lain untuk merealisasikan.

LIN-nya dulu baru provinsi dong.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Tidak ada namanya provinsi lumbung ikan nasional tidak ada Ketua. Provinsi Maluku, Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) itu benar Ketua, menurut saya betul Ketua.

KETUA RAPAT:

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai usulan tambahan pagu alokasi anggaran Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.286.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar rupiah) yang peruntukannya, antara lain untuk merealisasikan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Pemerintah setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Yang terakhir.

4. Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti semua masukan serta saran Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Itu catatan Ketua, tadi yang kita ingatkan tadi Ketua, sebelum Rapat Kerja itu sudah.

KETUA RAPAT:

Sudah saya sampaikan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Cuman mengingatkan Ketua, mohon maaf, sudah mulai eror.

KETUA RAPAT:

Pemerintah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat hari ini, kami persilakan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Pak Ketua, para Wakil Ketua dan Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI, serta para Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terima kasih atas pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat ini, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat hari ini, atas nama Pimpinan dan Pimpinan bayangan, serta Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kehilapan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 19.00 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
196508171988031002